

**ANALISIS KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT,  
KEPEMILIKAN KELUARGA, DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (*TAX AVOIDANCE*)  
(Studi Empiris Pada Perusahaan *Food and Beverages* yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Periode 2012-2013)**

**Idrus Mahidin**

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie  
Kampus Kuningan Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl.H.R. Rasuna Said Kav. C-22

**Nadifa Dewinta Danastri**

Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie  
Kampus Kuningan Kawasan Rasuna Epicentrum  
Jl.H.R. Rasuna Said Kav. C-22

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2013. Sampel dipilih dengan metode *purposive sampling* setiap tahun selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sehingga diperoleh 20 sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi), uji hipotesis (uji *t statistic* dan uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )) dengan menggunakan program SPSS 20.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris independen dan ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan komite audit dan kepemilikan keluarga secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diduga karena jumlah komite audit di dalam perusahaan tidak menjamin penghindaran pajak dapat berkurang dan diduga manajemen perusahaan masih memiliki peranan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemilik perusahaan, sehingga pemilik perusahaan belum dapat secara optimal menggunakan kekuasaannya untuk menentukan aktivitas perencanaan pajak.

Kata Kunci: *Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak*

**Abstract**

*The object of this study is to analyze the influence of independent commissioner, audit committee, family ownership, and firm size to tax avoidance. The population of this study is the food and beverages company for periods 2012-2013. Samples were selected by purposive sampling method using yearly data during 2012 to 2013 in order to obtain 20 samples. This study uses descriptive analysis, classic assumption test (test for normality, heteroskedasticity, multicollinearity, and*

*autocorrelation test), hypothesis testing (T-test and the test statistic coefficient of determination (  $R^2$  )) by using the program SPSS 20.*

*Based on the hypothesis testing results show that the independent commissioner and the firm size partially have negative significant impact on tax avoidance. While audit committee and family ownership partially have no impact on tax avoidance. It is presumed because the number of audit committee within the company does not guarantee that tax avoidance can be reduced. The management of the company has a stronger role compared to the owner of the company. Therefore, the owner of the company cannot be able to optimally use his power to determine the tax planning activities.*

*Key Words: Independent Commissioner, Audit Committee, Family Ownership, Firm Size, Tax Avoidance*

## **PENDAHULUAN**

Data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012, ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektagustor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014 yang dikeluarkan oleh pemerintah, pendapatan Negara dari sektor perpajakan adalah sebesar Rp 1.310 T atau sekitar 78,77% dari seluruh pendapatan negara ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia, pemerintah menganjurkan dilakukannya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak (Surat

Direktur Jenderal Pajak No.5-14/PJ.7/2003).

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Kurniasih & Sari, 2013). Berbeda dengan pemerintah yang menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang sering menyebabkan Wajib Pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

*Corporate Governance* didefinisikan sebagai efektivitas mekanisme yang

bertujuan meminimumkan konflik keagenan. Salah satu mekanisme dari sistem *GCG* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit sebagai bagian dari *corporate governance* untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Komisaris Independen memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas dalam menerapkan *corporate governance* (Agusti, 2014).

Komite audit membantu tugas komisaris dalam melakukan pengawasan, diantaranya adalah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka penilaian kecukupan pengendalian *intern* termasuk kecukupan informasi laporan keuangan (Reza, 2012).

Perusahaan yang digolongkan ke dalam perusahaan keluarga ialah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham dominan oleh seorang pemegang saham. Menurut Chen *et al.* (2010), perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan

non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari pendiri (*family owners*) atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Reza (2012) yang membahas tentang pengaruh dewan komisaris dan komite audit pada *tax avoidance*. Penelitian Reza (2012) menggunakan sampel semua perusahaan dalam industri non keuangan yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2010. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan dua variabel independen lain yaitu kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang *food and beverages* yang terdaftar di BEI berdasarkan salah satu kasus *tax avoidance* yang pernah terjadi di tahun 2012, dimana perusahaan PMA yang umumnya bergerak pada sektor makanan dan minuman yang ditenggarai telah melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini ingin menganalisis pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan

keluarga, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Hubungan antara teori keagenan dan penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh berbagai faktor terhadap tindakan *tax avoidance* adalah adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan tindakan manajemen pajak untuk menghindari pembayaran pajak perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang perpajakan yang nantinya akan berdampak pada pemilik perusahaan. Pengambilan keputusan oleh manajemen yang bersifat oportunistik dan tidak berdasarkan keinginan pemilik akan menyebabkan konflik yang dapat menimbulkan biaya keagenan yang harus dikeluarkan oleh pemilik perusahaan.

### **Definisi Konsep**

#### **Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, "*pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan*

*tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*".

### **Manajemen Pajak**

Manajemen pajak adalah melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan mengenai perpajakan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Pohan, 2011). Menurut Windriarti (2012), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

### **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* merupakan tindakan penghindaran pajak yang tidak ilegal, yaitu suatu usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang ada. Oleh karena itu, *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak

untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Pohan, 2008).

### **Komisaris Independen**

Wallace dan Zinkin (2005), mendefinisikan komisaris independen sebagai dewan komisaris yang bersifat independen dan bertanggung jawab atas pemberian kontribusi di dalam strategi dan pengawasan terhadap performa manajemen perusahaan. Berdasarkan Peraturan BI No.8/4/PBI/2006, komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang memang benar-benar berada dalam posisi netral dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan kepentingan dengan komisaris lainnya atau direksi atau pihak yang dapat mengurangi posisi independensinya.

### **Komite Audit**

Secara umum, komite audit berfungsi untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan dan laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan tersebut. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006), Komite Audit merupakan salah satu perangkat yang bertugas membantu Dewan

Komisaris untuk memastikan bahwa: (1) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; (2) struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik; (3) pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku; dan (4) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

### **Kepemilikan Keluarga**

Arifin (2003) mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan struktur kepemilikan menjadi perusahaan keluarga dan non-keluarga. Keluarga didefinisikan sebagai semua individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas wajib di catat), kecuali perusahaan publik, negara, intitusi keuangan dan publik (individu yang kepemilikannya tidak wajib dicatat). Kepemilikan keluarga dengan proporsi lebih dari 50% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan jika tidak maka dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

## **Ukuran Perusahaan**

Surbakti (2012), mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Menurut Hormati (2009), ukuran perusahaan ialah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya.

## **Hipotesis**

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance***

Minnick dan Noga (2010) menyimpulkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen pajak. Bernad (2011), dalam penelitiannya menemukan bahwa persentase komisaris independen dalam dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rates (ETR)*. Hasil penelitian dari Reza (2012)

juga menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian yang sama juga diperoleh oleh Agusti (2014) bahwa komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Fadhilah (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan dapat mempengaruhi hasil pelaporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan maka akan mengurangi tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan yang merupakan salah satu jenis manajemen pajak (Reza, 2012). Hasil penelitian yang dilakukan Reza (2012) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Singly dan Sukartha (2013) dalam penelitiannya mengatakan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

### **Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance***

Penelitian Chen, *et al.* (2010) membuktikan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap *ETR*. *ETR* yang tinggi membuktikan rendahnya tingkat agresivitas terhadap pajak. Pajak yang agresif mengindikasikan turunnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga *ETR* akan turun. Penelitian Chen, *et al.* (2010), yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan keluarga lebih agresif dalam tindakan pajaknya daripada perusahaan non-keluarga, menunjukkan bahwa pada perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam S&P 1500 index (1996-2000), perusahaan keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih kecil dibandingkan perusahaan non-keluarga, kepemilikan keluarga lebih rela membayar pajak lebih tinggi daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi rusaknya reputasi perusahaan akibat audit

dari fiskus pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka, hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Keluarga berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance***

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Terdapat dua teori yang digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *ETR* yaitu teori biaya politik dan teori kekuasaan politik. Dimana teori biaya politik (*political cost*) menyatakan bahwa tingkat visibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan mereka menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki tingkat *tax avoidance* yang besar (Zimmerman & Watts, 1983 dalam Richardson & Lanis, 2007). Kebalikan dari teori yang pertama, teori kekuasaan politik (*political power or clout theory*) menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal

(Siegfried, 1972 dalam Gupta & Newberry, 1997). Dengan adanya teori tersebut, perusahaan besar akan memiliki *tax avoidance* yang lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampling**

Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2013. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria yang dipakai dalam pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013, (2) Memiliki data laporan keuangan lengkap dan telah di audit secara berturut-turut yang diperlukan di dalam penelitian ini, (3) Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, (4) Penerbitan laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2012 – 2013, (5) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan selama 2 tahun secara berturut-

turut pada periode 2012-2013, dan (6) Data-data mengenai variabel yang akan diteliti tersedia dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang diterbitkan sejak tahun 2012 – 2013.

### **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu melalui internet dari situs resmi BEI. Data yang dikumpulkan adalah data perusahaan Manufaktur yang bergerak di bidang *food and beverages* periode 2012-2013 yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan dan *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan dokumen - dokumen yang dibutuhkan (dokumentasi). Dokumen yang dikumpulkan berupa laporan keuangan perusahaan yang tersedia di situs resmi BEI.

### **Definisi Operasionalisasi Variabel**

#### ***Tax Avoidance***

Bernad (2011) mengukur *tax avoidance* menggunakan *Current ETR*, dimana *ETR* atau *effective tax rates* (tarif

pajak efektif) adalah alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak yang merupakan salah satu jenis manajemen pajak. *Current ETR* digunakan dalam penelitian Derashid dan Zhang (2003) dan Reza (2012).

$$Current\ ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}$$

### Komisaris Independen

Variabel komisaris independen diukur dengan membagi jumlah dewan komisaris independen yang ada di perusahaan dengan jumlah seluruh dewan komisaris (Ardyansah, 2014).

$$INDEP = \frac{Jumlah\ Dewan\ Komisaris\ Independen}{Jumlah\ Seluruh\ Dewan\ Komisaris}$$

### Ukuran Komite Audit

Ukuran komite audit merupakan jumlah anggota komite audit dalam laporan tahunan yang tercantum dalam laporan tata kelola perusahaan.

$$AUDIT = \frac{Jumlah\ Komite\ Audit}{Jumlah\ Dewan\ Komisaris}$$

### Kepemilikan Keluarga

Dalam penelitian ini, kepemilikan keluarga merupakan *dummy variable*, bernilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga lebih besar dari 50% dan

dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga kurang dari 50% akan diberi nilai 0 dan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

### Ukuran Perusahaan

Variabel ukuran perusahaan dinyatakan dengan *SIZE*, diukur dengan cara logaritma natural dari nilai buku total nilai aset perusahaan (Gupta & Newberry, 1997).

$$SIZE = Ln(Total\ Assets)$$

### Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Current\_ETR_{it} = \alpha + \beta_1 INDEP + \beta_2$$

$$AUDIT_{it} + \beta_3 FAMILY_{it} + \beta_4 SIZE_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

Current\_ETR<sub>it</sub> = beban pajak kini yang harus dibayarkan perusahaan i tahun ke-t

INDEP<sub>it</sub> = proporsi komisaris independen pada perusahaan i tahun ke-t

AUDIT<sub>it</sub> = ukuran komite audit pada perusahaan i tahun ke-t

$FAMILY_{it}$  = kepemilikan keluarga diukur dengan variabel dummy pada perusahaan I tahun ke-t dengan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga > 50% akan diberi nilai 1 dan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan keluarga kurang dari  $\leq$  50% akan diberi nilai 0 dan dikategorikan sebagai perusahaan non-keluarga.

$SIZE_{it}$  = ukuran perusahaan i tahun ke-t

$\alpha$  = konstanta

$\beta_n$  = koefisien garis regresi

$\varepsilon$  = *error*

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### Hasil Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2009), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, dan *range*. Berikut tabel statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

**Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	20	0.1986	0.3173	0.258081
INDEP	20	0.3333	0.5000	0.382024
AUDIT	20	0.3750	1.5000	0.782857
FAMILY	20	0	1	0.55
SIZE	20	12.4282	18.1734	14.656133
Valid N (listwise)	20			

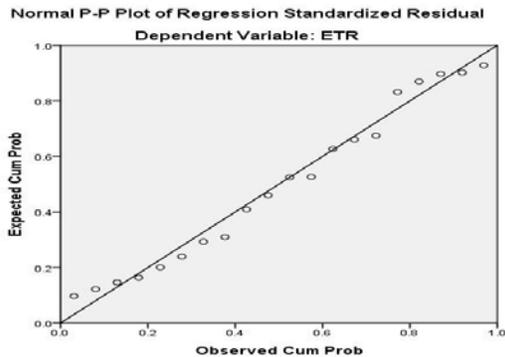
Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebesar 20 sampel. Tabel di atas menjelaskan mengenai deskripsi nilai minimum, maksimum, rata – rata, dan

standar deviasi dari seluruh variabel yang diteliti.

### Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Pertama, uji normalitas diuji dengan melihat gambar grafik *Normal P-P Plot*. Pada gambar *P-P Plot* terlihat titik-titik mengikuti dan mendekati garis diagonalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun untuk lebih jelasnya, pada penelitian ini juga digunakan uji metode *kolmogorov-smirnov* untuk melihat normalitas data dengan angka yang lebih detail.



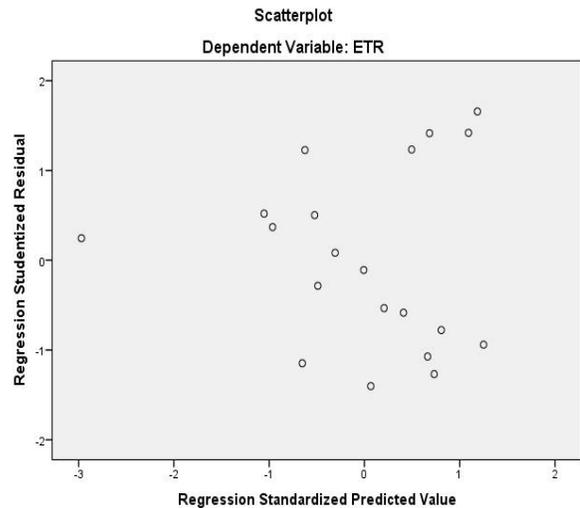
**Gambar 4.1 Uji Normalitas Grafik P-P Plot**

Uji normalitas kedua yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Berdasarkan hasil uji tersebut, *Asymp.Sig (2-tailed)* menunjukkan nilai sebesar 0.963. Dari hasil yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa model

regresi memenuhi asumsi normalitas karena nilainya lebih besar dari  $\alpha = 0.05$ .

### Hasil Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *scatterplot* dan uji *spearman*. Berdasarkan Gambar 4.2, grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa pada data tersebut terlihat tidak terdapat pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi penelitian ini.



**Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas ScatterPlot**

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel independen tidak memiliki masalah heteroskedastisitas,

Hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan yaitu AUDIT  $0.189 > 0.05$ , FAMILY  $0.583 > 0.05$ , dan SIZE  $0.056 > 0.05$ . Masalah heteroskedastisitas hanya terjadi pada satu variabel independen yaitu komisaris independen, dengan INDEP  $0.007 < 0.05$ .

### **Hasil Uji Multikolinearitas**

Terjadinya multikolinearitas dalam suatu penelitian dapat dilihat dari nilai TOL dan VIF yang terdapat pada masing-masing variabel independen. Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas adalah jika memiliki nilai *tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF dibawah 10. Berdasarkan Tabel 4.5 di bawah ini semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* dibawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

### **Hasil Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi merupakan uji yang dapat menunjukkan apakah variabel yang satu dengan yang lainnya memiliki kesinambungan. Penelitian ini menggunakan uji autokorelasi dengan metode pengujian Durbin-Watson. Hasil uji terhadap sampel dikatakan bebas dari

autokorelasi apabila nilai  $dW > dU$ . Sesuai dengan pengujian, sampel yang digunakan berjumlah 20 selama 2 tahun menghasilkan  $dU: 1.8283$ . Besar  $dW$  adalah  $2.837$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas pada sampel dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.

### **Uji Hipotesis**

#### **Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi menggambarkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini nilai dari  $R^2$  dilihat dari tabel *adjusted R-Square*-nya. Dalam Tabel 4.7 di bawah ini didapatkan nilai *adjusted R-Square* sebesar  $0.344$  untuk model *Tax Avoidance*. Hal tersebut berarti bahwa sebesar  $34.4\%$  variasi di dalam *Tax Avoidance* (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel komisaris independen (INDEP), komite audit (AUDIT), kepemilikan keluarga (FAMILY), dan ukuran perusahaan (SIZE), sedangkan  $65.6\%$  tingkat variasi dalam *tax avoidance* (ETR) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model penelitian.

## Hasil Uji Statistik T

Uji statistik T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual yaitu INDEP, AUDIT, FAMILY, dan SIZE dalam menerangkan variabel dependen yaitu ETR. Berikut hasil pengujiannya:

Berdasarkan hasil uji statistik T, terlihat bahwa variabel independen INDEP dan SIZE menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu ETR dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansi untuk INDEP dan SIZE masing – masing 0.013 dan 0.028 (sig.<5%). Berdasarkan pada Tabel 4.8 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi berganda pada penelitian ini yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$\text{ETR} = 0.551 - 0.289 \text{ INDEP} - 0.046 \text{ AUDIT} + 0.004 \text{ FAMILY} - 0.010 \text{ SIZE}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa koefisien konstanta sebesar 0.551 bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa ETR akan bernilai 0.551 apabila masing – masing variabel INDEP, AUDIT, FAMILY, dan SIZE bernilai 0.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil uji T menunjukkan bahwa dari T hitung < T tabel (-2.814 < -1.75305). Probabilitas menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.013. Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya anggota komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris di dalam perusahaan *food and beverages* dapat mengurangi tingkat *tax avoidance* di dalam perusahaan. Hal ini berarti, di dalam perusahaan *food and beverages* kinerja komisaris independen telah mengalami peningkatan sehingga tindakan *tax avoidance* mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen dalam perusahaan *food and beverages* telah melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan dan dapat dibuktikan bahwa komisaris independen yang merupakan pihak yang bukan anggota manajemen atau pihak yang memiliki posisi netral telah dapat meningkatkan efektivitas kinerja dewan komisaris

perusahaan dalam menjalankan fungsinya, untuk mengawasi manajemen untuk tidak melakukan sebuah kecurangan pajak dalam laporan keuangan perusahaan *food and beverages*.

Keefektifan komisaris independen juga dapat dilihat dari proporsi komisaris independen di perusahaan *food and beverages* itu sendiri, dalam penelitian ini ditemukan bahwa rata – rata proporsi komisaris sebesar 0.382024. Nilai rata – rata 0.382024 mengindikasikan bahwa rata – rata sampel perusahaan *food and beverages* sudah memenuhi batas minimal dari peraturan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30% seperti yang dijelaskan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor: Kep 315/BEJ/06-2000. Hasil penelitian tersebut sudah selaras dengan fungsi pengawasan dari dewan komisaris di perusahaan *food and beverages* itu sendiri yaitu berfungsi untuk dapat memberikan masukan dan nasihat kepada direksi dan manajemen serta melakukan pengawasan atas kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi dan manajemen. Selain telah melakukan fungsinya dengan baik, anggota dewan komisaris di perusahaan *food and beverages* tersebut dipastikan tidak ada yang merangkap jabatan yang sekiranya

dapat menimbulkan benturan kepentingan yang pada akhirnya dapat menimbulkan lemahnya independensi dari dewan komisaris tersebut. Hasil yang negatif menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat mencegah terjadinya *tax avoidance*. Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam melakukan perumusan strategi termasuk strategi yang berhubungan dengan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah (2014) yang menyatakan bahwa ukuran komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen dianggap tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen sehingga tidak dapat membantu untuk mengurangi *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bernad (2011) yang mendapati bahwa persentase anggota komisaris independen yang memenuhi persyaratan sebesar 30% dalam dewan komisaris dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan agar semakin efektif dan dapat mengurangi terjadinya praktik *tax avoidance*. Penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh Reza (2012) dan Agusti (2014) yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance***

Komite audit pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* tidak dapat didukung oleh data. Hal ini dilihat dari hasil T hitung < T tabel ( $-2.057 < -1.75305$ ) dan probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.057, maka  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa komite audit pada penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap variabel dependen *tax avoidance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perusahaan *food and beverages* semakin banyak jumlah komite audit dalam jajaran dewan komisaris dapat mengurangi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Dalam penelitian ini nilai rata – rata ukuran komite audit sebesar 1 orang anggota komite audit di dalam setiap perusahaan *food and beverages*. Adanya komite audit dalam perusahaan *food and*

*beverages* berfungsi untuk membantu dewan komisaris perusahaan dalam mengawasi manajemen terutama dalam segi keuangan. Sehingga jika dilihat dari fungsi komite audit dalam perusahaan *food and beverages* terbukti belum mampu untuk mengurangi praktik *tax avoidance* di dalam perusahaan *food and beverages*. Hal ini dikarenakan penunjukan anggota komite audit di perusahaan *food and beverages*, sebagian besar belum berdasarkan atas kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Sehingga anggota komite audit yang terpilih tidak dapat dalam melakukan pengawasan dan pengevaluasian terhadap kinerja operasional perusahaan dengan baik. Oleh karena itu, kinerja dari komite audit belum efektif dan optimal dalam mengembangkan dan menerapkan proses pengawasan untuk meminimalisir dilakukannya tindakan *tax avoidance* di perusahaan *food and beverages*.

Prakosa (2014) menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan dapat berjalan dengan baik karena telah mendapatkan dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan. Berdasarkan hasil tersebut, komite audit

dalam pelaksanaannya belum didukung oleh elemen-elemen lain yang berada di dalam perusahaan, yang menyebabkan komite audit gagal dalam melakukan pengawasan dengan baik (Hanum & Zulaikha, 2013). Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen perusahaan dalam hal pengambilan keputusan kebijakan beban pajak yang terkait dengan aktifitas *tax avoidance*. Jumlah anggota komite audit pada perusahaan *food and beverages* tidak dapat memberikan jaminan bahwa perusahaan tidak akan melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2012) yang menemukan bahwa komite audit dengan kompetensi di bidang keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam mengurangi tindakan *tax avoidance* di perusahaan. Sedangkan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2013) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap *Tax Avoidance***

Kepemilikan keluarga dalam penelitian ini terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji yang  $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$  ( $0.348 < 1.75305$ ) yang berarti,  $H_1$  ditolak dan  $H_0$  diterima. Probabilitas menunjukkan angka yang lebih besar dari 0.05 yaitu 0.733. Hal tersebut membuktikan bahwa kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan *food and beverages* di Indonesia masih di dominasi dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kepemilikan keluarga yang hanya sebanyak 5 perusahaan dari 12 perusahaan *food and beverages* yang diteliti membuktikan tidak dominannya jenis kepemilikan keluarga pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengaruh kepemilikan keluarga pada perusahaan di Indonesia tidak dapat mengurangi tindakan *tax avoidance* karena manajemen perusahaan masih memiliki peranan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan belum dapat secara optimal menggunakan kekuasaannya untuk menentukan aktivitas perencanaan pajak.

Meningkatnya *trend* investasi karena membaiknya ekonomi di Indonesia dan menurunnya tekanan dalam pasar keuangan mengakibatkan meningkatnya harga saham perusahaan. Keadaan ini menyebabkan menurunnya jumlah perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan membentuk perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar (meningkatnya kepemilikan publik). Pemilik perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan berani menjual saham dengan harga yang tinggi sehingga meningkatkan keuntungan pribadinya. Keadaan ini juga menunjukkan bahwa pemilik perusahaan dalam hal ini perusahaan *food and beverages* tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Ini mengakibatkan banyak terjadinya asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan *food and beverages* itu sendiri, dimana pemilik perusahaan tidak sepenuhnya mengetahui keputusan dan tindakan yang diambil dan telah dilakukan manajemen perusahaan *food and beverages*. Mekanisme asimetri informasi biasanya terjadi pada saat penyajian laporan yang berisi keadaan perusahaan tidak disajikan secara lengkap dan detail oleh manajemen kepada dewan komisaris

perusahaan *food and beverages*, termasuk dalam hal ini kebijakan perpajakan yang tidak lengkap, dan hanya menyajikan hal-hal yang dianggap menguntungkan manajemen saja. Keadaan asimetri informasi ini akan menjadi masalah terutama bagi pemilik perusahaan *food and beverages* selaku pemegang saham yang harus mengeluarkan *agency cost* dikarenakan kemungkinan kerugian yang didapatkan karena tindakan diluar pengawasan oleh manajemen perusahaannya. Asimetri informasi terjadi karena peranan yang sangat kuat dari manajemen perusahaan dalam mengendalikan perusahaan *food and beverages* itu sendiri.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2003), Prakosa (2014) serta Trisnani (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Tetapi, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatharani (2012) dimana kepemilikan keluarga tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen *tax avoidance* dimana hasil uji T menunjukkan bahwa  $T_{hitung} < T_{tabel}$  ( $-2.430 < -1.75305$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Probabilitas menunjukkan angka yang lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.028. Hasil ini sesuai dengan hipotesis keempat yang diajukan yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dari perusahaan *food and beverages* di Indonesia, maka perusahaan tersebut akan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menurunkan tingkat *tax avoidance* perusahaan. Sejak awal tahun 2011, pertumbuhan ekonomi jangka menengah cukup tinggi, Hal ini didukung oleh perbaikan produktivitas yang sejalan dengan meningkatnya investasi, baik investasi secara fisik maupun investasi sumber daya. Investasi fisik berupa aset tetap sedangkan investasi sumber daya dioptimalkan oleh perusahaan dalam hubungannya dengan penentuan kebijakan perpajakannya untuk menurunkan tingkat *tax avoidance*. Selain itu perusahaan

multinasional yang besar dan memiliki cabang di luar negeri memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada di negara tempat cabang perusahaan, seperti melakukan *offshore licensing*, sehingga dapat membayar pajak yang lebih kecil dari yang semestinya. Perusahaan multinasional yang memiliki cabang perusahaan di luar negeri memanfaatkan peraturan perpajakan yang ada di negara tersebut, dengan *offshore licensing*, perusahaan mentransfer keuntungan perusahaan sebagai “biaya lisensi” dan hanya dikenakan pajak yang rendah, yaitu 2%, di beberapa negara-negara tertentu seperti di Belanda dan Swiss.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Siegfried (1972) dalam Gupta dan Newberry (1997) yaitu teori kekuasaan politik (*political power or clout theory*), yang menyatakan bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. Dengan adanya teori tersebut, perusahaan besar akan memiliki *tax avoidance* yang lebih rendah. Teori kekuasaan politik yang menyatakan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki

tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah dikarenakan perusahaan tersebut mempunyai substansi sumber daya yang mampu memanipulasi proses politik yang dikehendakinya, dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga dapat melakukan penghematan pajak (*tax savings*) secara optimal (Siegfried, 1972 dalam Lestari, 2010). Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007), Rodriguez dan Arias (2012) serta Ardyansah dan Zulaikha (2014), yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan *tax avoidance*. Penelitian-penelitian sebelumnya ini juga mendukung teori kekuasaan politik (*political power or clout theory*) di dalam penelitiannya.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance* dan mendukung teori biaya politik (*political cost*). Teori biaya politik (*political cost*) menyatakan bahwa tingkat visibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan mereka menjadi korban

peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh perusahaan. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki tingkat *effective tax rates* yang besar (Zimmerman & Watts, 1983 dalam Richardson & Lanis, 2007).

## **Simpulan, Keterbatasan, dan Saran**

### **Simpulan**

Penelitian ini meneliti pengaruh proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan – perusahaan *food and beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012 – 2013. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, (2) Komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, (3) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dan (4) Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### **Keterbatasan**

Penelitian ini tentunya memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian – penelitian selanjutnya, yaitu penggunaan model dalam mendeteksi *tax avoidance* dalam penelitian ini belum mampu mendeteksi dengan baik sehingga masih memerlukan justifikasi model lain dan *tax avoidance* yang terjadi dalam perusahaan *food and beverages* hanya didasarkan dari laporan keuangan yang kurang menggambarkan keadaan nyata perusahaan karena data tentang *tax avoidance* yang sebenarnya sulit untuk diperoleh.

### **Saran**

Merujuk pada keterbatasan penelitian di atas dan literatur terkait lainnya, maka beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu: (1) Melakukan kajian ulang terhadap proksi – proksi yang digunakan pada variabel – variabel yang dipilih khususnya variabel komite audit dan kepemilikan keluarga sehingga hasil yang didapatkan dapat lebih baik dan dapat merepresentasikan variabel tersebut dengan lebih tepat, (2) Melakukan penambahan variasi pada variabel independen sehingga pengaruhnya dapat terlihat jelas terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan

hanya variabel komisaris independen dan ukuran perusahaan saja yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* dan dari hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa hanya sebesar 34.4% variasi di dalam *tax avoidance* dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya, (3) Melakukan penambahan jangka waktu penelitian, tiga hingga lima tahun, untuk melihat hasil dalam periode jangka panjang mengenai pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan praktik *tax avoidance* dilakukan pihak manajemen dalam jangka waktu yang lama seperti yang ditemukan pada kasus – kasus *tax avoidance* yang telah terjadi baik di luar maupun di dalam negeri, (4) Memperluas lingkup pengamatan terhadap sektor industry lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar hasil dari penelitian yang akan dilakukan dapat lebih di generalisasi, dan (5) Mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam mendeteksi *tax avoidance* dengan sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, W. Y. (2010). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011). *Jurnal*. Universitas Negeri Padang.
- Ardyansah, D. & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 03, No. 02, 2-9.
- Ardyansah, D. (2014). Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arifin, Z. (2003). Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. *Disertasi*. Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Depok.
- Bappenas. (2005). Tak Mungkin Lima Tahun Terus Merugi. [file:///C:/Users/Student/AppData/Local/Temp/digital\\_blob\\_F31921\\_750%20PMA%20tak%20Bayar%20Pajak.htm](file:///C:/Users/Student/AppData/Local/Temp/digital_blob_F31921_750%20PMA%20tak%20Bayar%20Pajak.htm) . Diakses pada 22 April 2015.
- Bernad, H. (2011). *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak*. Jurnal. Universitas Indonesia. Depok.
- Bisnis Indonesia 22 November 2005. “Depkeu sisir 750 PMA yang mengaku rugi”. Diakses pada tanggal 21 April 2015.
- Bursa Efek Jakarta. (2001). SE-008/BEJ/12-2001. Keanggotaan Komite Audit.
- Chen, K. P. & Chu, C. Y. C. (2010). *Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion*. *Rand Journal of Economics*.
- Derashid, C. & Zhang, H. (2003). Effective Tax Rates and the Industrial Policy, Hypothesis: Evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 12, pp. 45-62*.
- Direktorat Jenderal Pajak. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada 22 April 2015.
- Dirjen Pajak: Indonesia Bagai Surga Pajak, 2013. <http://www.merdeka.com/ua/ng/dirjen-pajak-indonesia-bagai-surga-pajak.html> . Diakses pada 22 April 2015.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2011). *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. April 26, 2015. [https://muharieffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi\\_booklet\\_i.pdf](https://muharieffendi.files.wordpress.com/2009/12/fcgi_booklet_i.pdf)
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (4<sup>th</sup> ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*.
- Hanum, R., H., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal* Vol. 2 Nomor 2. Universitas Diponegoro.
- Hormati, A. (2009). Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Implementasi Corporate Governance. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, No. 02, hal 288-298.
- Indonesian Capital Market Directory. (2015). Jakarta Bursa Efek Indonesia.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18, No. 01, ISSN:1410-4628.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance). (2006). "Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia". KNKG, Jakarta.
- Minnick, & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?. *Journal of Corporate Finance* 16 (2010), pp. 703-718.
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2004). *The OECD Principles of Corporate Governance*. (<http://www.oecd.org>), diakses tanggal 22 April 2015.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), diakses pada 21 April 2015.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan. <http://data.bisnis.com/read/regulasi/1036/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-77-m-dag-per-12-2013-tentang-penerbitan-surat-izin-usaha-perdagangan-dan-tanda-daftar-perusahaan-secara-simultan-bagi-perusahaan-perdagangan>, diakses pada 23 April 2015.

- Pohan, A. (2011). *Optimizing Corporate Tax Management – Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Pohan, H. T. (2008). “Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak”. (<http://hotmanpohan.blogspot.com> diakses pada tanggal 11 April 2015).
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*.
- Reza, F. (2012). *Pengaruh Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Republik Indonesia, Surat Direktur Jendral Pajak No. 5-14/Pj.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689-704.
- Rodriguez, E. F., & Arias, A. M., (2013). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate?. *The Chinese Economy*, Vol. 45 No. 6.
- Surbakti, T. A. (2012). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010*. Skripsi. Universitas Indonesia. Depok.
- Swingly, C. & Sukartha, I. M. (2013). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *Jurnal*. Universitas Udayana. Bali.
- Trisnani, W. P. (2014). Pengaruh Return On Assets (ROA), Kepemilikan Keluarga, dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Wallace, P., & Zinkin, J. (2005). *Mastering Business in Asia: Corporate Governance*. Singapore: John Wiley and Sons.
- Windriarti, M. (2012). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Semen Tonasa di Pangkep. *Jurnal*. Universitas Hasanuddin, Makassar.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.fcgi.or.id](http://www.fcgi.or.id)